

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sejenis Sebelumnya**

Kebijakan pengembangan koleksi memang perlu diperhatikan, terutama dengan adanya perkembangan zaman yang ada serta penyesuaian kondisi lingkungan lembaga perpustakaan yang akan berdampak pada kelangsungan kegiatan pengembangan koleksi. Terdapat beberapa penelitian sejenis sebelumnya yang membahas tentang kebijakan pengembangan koleksi pada masing-masing lembaga yang dalam penelitian ini akan digunakan untuk menambah wawasan serta menunjukkan orisinalitas dan pembeda dengan penelitian ini.

Penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Pengembangan Koleksi Terbitan Berkala di Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Petra” oleh Yhoga Trieda Putra ini mengenai kebijakan pengembangan koleksi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut ditetapkan atau dilaksanakan serta hal yang berkorelasi pada proses pengadaan koleksi. Penelitian yang terfokus pada jenis terbitan berkala berupa jurnal tercetak maupun *database* jurnal *online* yang terbit tahun 2013 ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil Perpustakaan Universitas Kristen (UK) Petra telah menetapkan kebijakan secara tertulis walaupun pada saat ini masih dalam revisi, meskipun dalam pelaksanaannya

tetap berjalan dan sesuai dengan pedoman kebijakan pengembangan koleksi. Penelitian Yhoga Trieda Putra dengan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu kebijakan pengembangan koleksi namun ada beberapa perbedaan yaitu objek pada penelitian yang akan dilakukan yaitu pada koleksi khusus, dalam penelitian Yhoga Trieda Putra membahas koleksi khusus terbitan berkala sedangkan penelitian ini membahas pada koleksi naskah kuno yaitu Naskah Nusantara. Kemudian tempat penelitian Yhoga Trieda Putra adalah Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Petra sedangkan tempat penelitian ini adalah PNRI. Terakhir metode penelitian Yhoga Trieda Putra adalah kuantitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Penelitian berikutnya berjudul “*Collection Development Policy and Selection Criteria for Electronic Materials: Indian Perspectives*” ialah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Dibyendu Paul dalam jurnal *International Journal of Information Dissemination and Technology* volume 1(3) tahun 2011. Penelitian yang dilakukan Paul adalah penelitian berkaitan dengan kebijakan pengembangan koleksi *electronic materials di perpustakaan*. Penelitian terdahulu membahas kriteria untuk pemilihan sumber daya elektronik, setiap bagian dari kebijakan pengembangan koleksi, identifikasi serta evaluasi. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada variable yang diteliti yaitu kebijakan pengembangan koleksi. Perbedaannya adalah objek penelitiannya pada penelitian terdahulu koleksi elektronik dan penelitian ini yaitu naskah, namun dengan hal itu keduanya masih membahas tentang koleksi khusus.

Penelitian sejenis sebelumnya juga pernah dilakukan oleh mahasiswa ilmu perpustakaan Universitas Indonesia Ahmad Syaikh dalam tesisnya yang berjudul “Evaluasi kebijakan pengembangan koleksi tahun 2006-2007 studi kasus di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Ambon” penelitian yang dilakukan tahun 2009 ini membahas kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon tahun 2006-2007. Penelitian yang menggunakan metode studi kasus dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif ini, menarik informan penelitian kurang dari lima orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan tentang pengembangan koleksi perpustakaan. Hasil penelitian tersebut menengarai bahwa masih belum diadakannya kebijakan tertulis, dimana kebijakan pengembangan koleksi yang diterapkan adalah kebijakan lisan dari pimpinan perguruan tinggi kepada kepala perpustakaan, keputusan rapat tingkat pimpinan bersama kepala perpustakaan, Keputusan rapat kerja tahunan, dan keputusan pimpinan perguruan tinggi tentang buku sumbangan wajib bagi mahasiswa akhir studi, sehingga diajukan rekomendasi perlunya kebijakan pengembangan koleksi tertulis, mengingat penerapan kebijakan lisan sulit dijadikan acuan dalam penemuan koleksi perpustakaan IAIN Ambon. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada dasarnya memiliki kesamaan di keseluruhan yang membedakan hanyalah subjeknya saja. Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan acuan, metode serta sasaran hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Konsep Naskah Kuno

Naskah kuno adalah bahan cetak dan non cetak yang berusia minimal 50 tahun yang mengandung informasi kebudayaan suatu masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014). Naskah Nusantara ialah naskah kuno yang dihasilkan sebagai produk kegiatan manusia yang memuat pemikiran, perasaan, kepercayaan, adat kebiasaan, dan nilai-nilai yang berlaku dikalangan masyarakat tertentu di kawasan Nusantara pada masa lampau.

Sudarsono (2009: 13) mengartikan naskah kuno sebagai “darah kehidupan sejarah”. Pengertian di atas menunjukkan bahwa naskah kuno termasuk dalam warisan budaya yang bernilai tinggi. Warisan budaya sendiri terbagi menjadi tiga kelompok yakni warisan budaya berupa alam, warisan budaya berupa peninggalan benda-benda yang mengandung nilai budaya (*cultural heritage*), dan warisan budaya berupa aktivitas atau kegiatan yang ada dalam masyarakat atau disebut *cultural place* (Sukaesih, 2016: 178). Berdasarkan pengelompokan tersebut naskah kuno termasuk dalam warisan budaya yang berupa peninggalan benda atau disebut juga *cultural heritage*, karena dilihat dari bentuknya, naskah kuno terdiri dari aksara dan bahasa daerah yang dituangkan pada daun tal atau lontar, bambu, rotan, daun nipah, tanduk, kulit kayu, tulang, kulit binatang, *dluwang*, kertas Eropa, dan kain (Suprihati dalam zulfitri, 2014: 82).

Naskah kuno ini dikenal sebagai warisan budaya yang indah, kaya ragam bentuk dan tema, yang tersebar ke seluruh wilayah Nusantara. Damayanti (2007: 73) menyebutkan bahwa selain dilihat dari ragam bentuknya naskah kuno

Nusantara diklasifikasikan dalam katalog induk menjadi dua belas jenis dan kategori yakni Naskah Sejarah, Naskah Silsilah, Naskah Hukum, Naskah Sastra, Naskah *Piwulang*, Naskah Islam, Naskah Primbon, Naskah Ilmu Bahasa, Naskah Musik, Naskah Tari-Tarian, Naskah Adat Istiadat, dan Naskah Ilmu Pengetahuan.

Bahar dan Mathar (2015: 91) menyebutkan bahwa naskah kuno merupakan hasil pemikiran masyarakat masa lampau pada suatu wilayah yang dituangkan dalam tulisan, baik berupa nilai sejarah, kebiasaan, ilmu pengetahuan, adat istiadat, maupun ilmu pengetahuan yang berusia kurang lebih lima puluh tahun yang keberadaannya sendiri perlu diperhatikan. Keberadaan Naskah Kuno Nusantara sebagai warisan budaya yang ada pun memiliki perannya tersendiri dalam dunia perpustakaan dan informasi di masa mendatang demi perkembangan keilmuan, di mana banyak pihak yang harus bertanggung jawab akan keberadaan salah satu bentuk warisan budaya ini. Seperti yang tertuang pada Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyebutkan bahwa masyarakat, pemerintah, dan tentunya ialah lembaga di bidang perpustakaan dan informasi memiliki tanggung jawab melestarikan *cultural heritage*, yang mana salah satunya adalah naskah kuno. Perpustakaan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melestarikan naskah kuno (*cultural heritage*) melakukan kegiatan pengelolaan yang di dalamnya termasuk kegiatan pengembangan koleksi naskah kuno, demi tercapainya visi dan misi lembaga itu sendiri.

### **2.2.2 Konsep Pengembangan Koleksi**

Perpustakaan sebagai salah satu yang bertanggung jawab dalam pengembangan koleksi tentu memiliki visi dan misi di dalamnya. Menurut Michael R. Gabriel (dalam Rahmanto, 2011: 7) pengembangan koleksi merupakan proses membangun koleksi perpustakaan secara sistematis untuk memenuhi keperluan pembelajaran, pengajaran, penelitian, rekreasi, dan kebutuhan lainnya dari para pengguna perpustakaan. Pernyataan tersebut sangat jelas dipaparkan bahwa pengembangan koleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua koleksi dapat ditata, dirawat, dilestarikan dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pemustaka dalam cara yang tepat waktu dan ekonomis, menggunakan sumber daya informasi yang diolah oleh bagian dalam maupun luar organisasi.

Bernhard (dalam Winoto, 2016: 122) menyebutkan beberapa tujuan dari pengembangan koleksi yakni menambah jumlah koleksi atau mengharapkan untuk memilikinya, memperoleh koleksi yang ditulis oleh pengarang yang populer di kalangan pembaca, memenuhi kewajiban perpustakaan untuk menunjang pencapaian tujuan lembaga, menambah nilai koleksi melalui pengadaan bahan pustaka yang aktual dan bahan pustaka dasar dalam suatu subjek penting, memperoleh bahan-bahan pustaka atau buku-buku referensi yang mampu menyuplai informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, melengkapi informasi dalam subjek yang masih kurang atau belum ada sama sekali, atau belum mencukupi kebutuhan pemakai. Menurut Sutarno NS (dalam Suharti, 2017: 60) pengembangan koleksi juga memiliki manfaat yakni membantu menetapkan metode untuk pengadaan koleksi, membantu perencanaan bentuk kerjasama baik pengadaan,

membantu mengidentifikasi koleksi yang diperlukan, membantu merencanakan anggaran dan sasaran pengembangan, serta membantu memilih cara terbaik untuk pengadaan koleksi.

Menurut Evans (dalam Almah, 2012: 35) proses pengembangan koleksi sendiri terdiri dari enam komponen kegiatan, yaitu analisis masyarakat, kebijakan seleksi, seleksi, pengadaan, penyiangan, evaluasi. Pengembangan koleksi yang efektif berasal dari perencanaan baik untuk memperbaiki kelemahan koleksi dan memelihara kekuatan koleksi yang ada sesuai dengan pencapaian tujuan lembaga, tentunya berasal dari kebijakan yang baik pula. Maka dari itu diperlukan kebijakan dalam kegiatan pengembangan koleksi demi kepentingan pengguna perpustakaan.

### **2.2.3 Konsep Kebijakan Pengembangan Koleksi**

Kebijakan yaitu langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan semua strategi perpustakaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Sutarno, 2006: 153). Salah satu hal yang perlu diatur dalam sebuah kebijakan di perpustakaan adalah koleksi. Sebab koleksi sebagai sumber daya informasi merupakan komponen utama dalam perpustakaan. Kebijakan yang ditujukan untuk menjaga kualitas sumber daya informasi di perpustakaan disebut dengan kebijakan pengembangan koleksi. Sutarno juga menyebutkan bahwa kebijakan pengembangan koleksi biasanya dalam bentuk tertulis secara rinci, yang telah disepakati (2006: 153). Kebijakan tertulis tersebut digunakan untuk panduan kegiatan pengembangan koleksi itu sendiri. Kegiatan pengembangan koleksi

memiliki tujuan dan biasanya melibatkan sumberdaya yang ada di perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan suatu acuan yang dapat menjadi pedoman agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan kegiatan pengembangan koleksi di perpustakaan. Untuk membina koleksi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap perpustakaan sebaiknya memiliki pedoman tertulis untuk pengembangan koleksi perpustakaan yang biasa disebut dengan kebijakan pengembangan koleksi (Sukarman dalam Putra, 2000: 19). Lebih lanjut, Sukarman menyatakan bahwa kebijakan pengembangan koleksi adalah berbagai ketentuan yang disepakati oleh pimpinan perpustakaan dan pihak terkait lainnya, dalam upaya menambah dan memperluas koleksi perpustakaan.

Sutarno (2006: 153) memaparkan asas-asas yang mendasari kebijakan pengembangan koleksi yang perlu memperhatikan relevansi koleksi serta berorientasi kepada kebutuhan pengguna. Pemenuhan kebutuhan koleksi dalam hal ini meliputi kelengkapan koleksi, kemutakhiran, serta kerjasama dengan pihak eksternal demi pendayagunaan koleksi. Hal inilah yang menjadi dasar dalam kebijakan pengembangan koleksi, mayoritas berisi tentang pengaturan terkait pengadaan koleksi, sebab pengadaan koleksi merupakan ujung tombak yang dapat menjaga siklus kemutakhiran sumber daya informasi. Kebijakan koleksi secara garis besar memiliki fungsi yang dibagi menjadi tiga kelompok yakni, fungsi perencanaan, fungsi komunikasi internal, dan fungsi komunikasi eksternal (Yulia dalam Imron, 2011: 21). Ketiga fungsi tersebut berorientasi pada beberapa faktor internal dan eksternal, seperti sumberdaya, pemustaka, anggaran, masyarakat, serta lembaga eksternal yang terkait. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya



peningkatan kerja sama antar perpustakaan, pemerintah, serta lembaga masyarakat atau perorangan yang memiliki koleksi.

Kebijakan bersifat penting dan memiliki manfaat yang besar untuk kelangsungan kegiatan pengembangan koleksi. Imron (2009: 22) memaparkan manfaat dari dibuatnya kebijakan. Kebijakan dapat menjadi dokumen untuk sosialisasi kepada masyarakat sebagai standar untuk menginformasikan kepada pemustaka tentang sifat dan ruang lingkup koleksi, menginformasikan prioritas pengoleksian, mendorong pemikiran tentang prioritas organisasi untuk koleksi naskah, menghasilkan komitmen pada tingkat tertentu sesuai dengan sasaran perpustakaan serta menentukan standar untuk materi yang bisa masuk daftar koleksi dan mana yang tidak masuk dalam pengadaan. Memberikan sebuah sarana pelatihan dan orientasi bagi staf baru dengan menjamin konsistensi dari waktu ke waktu walaupun staf pengelola berganti. Memberikan pedoman kepada staf dalam pengambilan keputusan. Membantu dalam penyiangan dan evaluasi koleksi.

Manfaat kebijakan pengembangan koleksi seperti yang disebutkan di atas tidak hanya berdampak pada kegiatan itu sendiri, namun juga akan berdampak langsung pada perpustakaan terkait. Menurut Futas (dalam Rahmanto, 2011: 13) proses pembuatan kebijakan pengembangan koleksi dimulai oleh sekelompok orang yang peduli dengan masa depan perpustakaan, sehingga nantinya akan tercipta layanan perpustakaan yang prima dengan menggunakan anggaran dana secara bijaksana. Pembuatan kebijakan tentunya perlu memperhatikan perumusan hal yang perlu dilakukan dan diselesaikan. Pengumpulan berbagai jenis informasi untuk pendukung pembuatan keputusan juga perlu diperhatikan. Hal terpenting

dalam proses pembuatan kebijakan pengembangan koleksi ialah memformulasikan dan menuangkan dalam bentuk dokumen kebijakan yang disepakati bersama.

Kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan secara terarah, memerlukan adanya ketentuan yang jelas sebagai pegangan dan pelaksana lainnya dalam pengembangan koleksi. Menurut Qalyubi (dalam Rahmanto, 2011: 9) kebijakan pengembangan koleksi perlu dilakukan secara terarah, dan harus disusun secara tertulis. Kebijakan pengembangan koleksi yang tertulis harus menjadi dokumen publik yang bisa di akses oleh siapapun. Kebijakan tertulis yang baik memerlukan elemen-elemen yang tersusun agar terarah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Menurut Disher (dalam Rahmanto, 2011: 14) terdapat beberapa elemen seperti pendahuluan; visi, misi, dan tujuan; pemustaka; penanggung jawab pengembangan koleksi; pernyataan kebebasan intelektual; kebijakan seleksi, prosedur dan prioritas; koleksi khusus; penyiangan; hadiah; hubungan kerjasama; serta penanganan keluhan dan tantangan ke depan perlu dijelaskan dalam kebijakan pengembangan koleksi.

Kebijakan pengembangan koleksi yang seharusnya memang bersifat terarah dan tertulis agar dapat tetap pada konsekuensinya. Kegiatan bersifat *cyclical* atau terus menerus (Evans dalam Winoto, 2016: 123). Kebijakan yang ada pada tiap rumusan pengembangan koleki memang tidak selalu sama, tergantung pada jenis perpustakaan, struktur organisasi, dan kebijakan yang ditetapkan oleh perpustakaan yang bersangkutan. Darmono (dalam Rahmanto, 2011: 16) mengatakan bahwa perbedaan kebijakan antara satu perpustakaan dengan perpustakaan lainnya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pembeda, seperti kebijakan pemerintah, kondisi

ekonomi yang berpengaruh pada kebijakan pendanaan, keadaan penerbitan, kebiasaan pemakai, sikap masyarakat, serta faktor-faktor lain yang bersifat lokal. Setiap kebijakan pengembangan koleksi yang dibuat tentunya diperlukan adanya perubahan karena bersifat *cyclical* dan perlu mengikuti perkembangan serta kondisi perpustakaan yang bersangkutan. Maka dari itu kebijakan pengembangan koleksi memerlukan pembaharuan melalui evaluasi pada kebijakan pengembangan koleksi.

#### **2.2.4 Evaluasi Kebijakan Pengembangan Koleksi**

Kebijakan yang telah dibuat atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan sebuah kegiatan perpustakaan. Banyak kalangan berpendapat bahwa kebijakan tidak akan mencapai keberhasilan apabila dalam penerapannya jauh dari sesuai dengan tujuannya. Menurut Anderson (dalam Winarno 2008: 166) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk mengetahui keberhasilan penerapan sebuah kebijakan yang telah diterapkan maka diperlukan adanya kegiatan evaluasi pada tahap akhir proses kebijakan. Namun, menurut Dunn (2000: 24) evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Evaluasi menekankan pada pengukuran dari suatu kebijakan, termasuk materi, implementasi, pencapaian tujuan, dan dampak dari kebijakan tersebut, bahkan evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor

yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan hingga dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan keputusan.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan serta identifikasi dampak suatu kebijakan pengembangan koleksi dapat dianalisa menggunakan berbagai cara, salah satunya menggunakan analisis “*SWOT analysis*” meliputi adanya kekuatan (*strenghten*), kelemahan (*weakness*), kesempatan atau peluang (*opportunity*), dan adanya ancaman atau disebut juga *threats* (Sutarno, 2006: 119). Terdapat pembagian faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam analisis *SWOT* ini yaitu kekuatan dan kelemahan berada dalam internal organisasi perpustakaan, sedangkan yang dapat dilihat dari luar organisasi perpustakaan adalah kesempatan dan ancamannya.

Lebih lanjut, Pearche dan Robinson (dalam Jinnahur, 2017: 37) mendefinisikan istilah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai berikut, peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi yang merupakan pengganggu bagi posisi sekarang atau yang diinginkan. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan lain terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin

dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Sedangkan kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan atau organisasi. Analisis *SWOT* memiliki kegunaan dalam organisasi non-profit (Bryson, 2011: 155). Pernyataan Bryson tersebut dapat ditengarai bahwa analisis *SWOT* memiliki peran penting dalam proses perencanaan strategis karena dapat memberikan penilaian terhadap situasi yang sedang dihadapi oleh organisasi, sehingga dapat memberikan keputusan yang cermat. Analisis *SWOT* dapat memberikan bahan evaluasi bagi organisasi apabila menghadapi kebijakan yang kurang tepat sasaran dalam pelaksanaannya.

Perpustakaan dikategorikan sebagai organisasi *non-profit* yang dapat menggunakan analisis *SWOT* dengan kegunaan memberikan analisis situasi suatu organisasi yang dapat menunjukkan faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal, serta menunjukkan faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal. Dengan memahami kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal perpustakaan khusus, maka dapat diketahui faktor kekuatan dan kelemahan dari kondisi lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman dari kondisi lingkungan eksternal perpustakaan sehingga *SWOT* dapat membantu perpustakaan dalam merancang visinya ke depan sehingga semua program yang telah dibuat menjadi relevan dan inovatif.

Ayuningtyas (2013: 65) mengemukakan bahwa untuk melakukan analisis *SWOT* perlu melalui tiga tahap, yaitu mengidentifikasi dan membuat daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tahap kedua yaitu membuat matriks

*SWOT* dengan memasukkan seluruh faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ke masing-masing tabel yang berbentuk *tabel IFAS (Internal Factors Analysis Summary)* dan *EFAS (External Factors Analysis Summary)*. Dan tahap ketiga yaitu membuat alternatif-alternatif strategi dari penyesuaian logis faktor yang terdapat dalam kolom-kolom matriks *SWOT*. Kekuatan utama analisis *SWOT* muncul dari kesesuaian faktor kekuatan dan kelemahan dari penilaian kondisi lingkungan internal dan faktor peluang dan ancaman dari penilaian kondisi lingkungan eksternal. Menurut Ruan dan Jan (dalam Deards dan Springs, 2014: 161) aspek penilaian kondisi lingkungan internal dan eksternal suatu perpustakaan yaitu terdapat *history, programs, services, information, teknologi* dan *competition* dalam penilaian kondisi internal. Sedangkan dalam lingkungan eksternal penilaian dapat dilihat dari *content, teknologi, e-publishing* dan *copy right*.

Ada empat kategori dasar penyesuaian yang dihasilkan matriks ini yaitu, *SO (Strengths-Opportunities)*, *ST (Strengths-Threats)*, *WO (Weaknesses-Opportunities)*, *WT (Weaknesses-Threats)*. Berikut ini adalah tabel matriks *SWOT* yang digunakan dalam pembuatan alternatif-alternatif strategi sebagaimana telah disebutkan:

Tabel 2.1. Matriks SWOT IFAS

<i>EFAS</i> \ <i>IFAS</i>	<i>STRENGTHS (S)</i> Tentukan 5-10 faktor kekuatan dari penilaian kondisi lingkungan internal	<i>WEAKNESSES (W)</i> Tentukan 5-10 faktor kelemahan dari penilaian kondisi lingkungan internal
<i>OPPORTUNITIES (O)</i> Tentukan 5-10 faktor peluang dari penilaian kondisi lingkungan eksternal	<i>STRATEGI SO</i> Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	<i>STRATEGI WO</i> Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang
<i>THREATS (T)</i> Tentukan 5-10 faktor Ancaman dari penilaian kondisi lingkungan eksternal	<i>STRATEGI ST</i> Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	<i>STRATEGI WT</i> Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

(Sumber: Rangkuti, 1999: 20)

Pada proses perencanaan strategis pengembangan koleksi perpustakaan, matriks *SWOT* akan menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi seperti tabel 2.1 yang mengacu pada penilaian kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal perpustakaan dalam lingkup pengembangan koleksi perpustakaan. Data yang mendukung masing-masing faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dikelompokkan dalam tabel lembar kerja kekuatan-kelemahan (*S-W*) dan tabel lembar kerja peluang-ancaman (*O-T*). Lembar kerja *SWOT* ini menggambarkan setiap kondisi perpustakaan, kemudian dianalisis menggunakan model perumusan matriks *SWOT* yang berbentuk tabel *IFAS* (*Internal Factors Analysis Summary*) dan *EFAS* (*External Factors Analysis Summary*) yang digunakan untuk menyusun seluruh faktor strategi *SWOT* pengembangan koleksi perpustakaan.

Strategi SO atau strategi kekuatan-peluang dibuat berdasarkan jalan pikiran perpustakaan yang menggunakan seluruh kekuatan internal perpustakaan untuk memanfaatkan peluang eksternal yang sebesar-besarnya dalam pengembangan koleksi perpustakaan. Penilaian kondisi lingkungan perpustakaan dilakukan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada suatu perpustakaan. Hasil analisis SWOT dapat dijadikan sebagai landasan dan pertimbangan untuk mempersiapkan, menata, dan melakukan tindakan yang lebih tepat dalam menghadapi permasalahan di perpustakaan, sehingga penyelenggaraan perpustakaan dapat memenuhi keinginan dan permintaan pemakai (Sutarno, 2006: 119). Analisis ini bertujuan untuk menyusun kembali kebijakan pengembangan koleksi di masa yang akan datang, sebagaimana pembentukan kebijakan yang baik ialah kebijakan yang melalui proses evaluasi di dalamnya. Salah satu kegiatan evaluasi yang dapat dilakukan ialah melalui analisis *SWOT*. Pendekatan analisis SWOT dapat membantu pihak manajemen untuk mengkategorisasi faktor internal dan eksternal yang terkait dengan objek kebijakan, yaitu pengembangan koleksi, yang mana kemudian hasil kategori faktor internal dan eksternal tersebut dijadikan landasan untuk memperbaiki konten sebuah kebijakan agar senantiasa mengikuti perkembangan jaman.